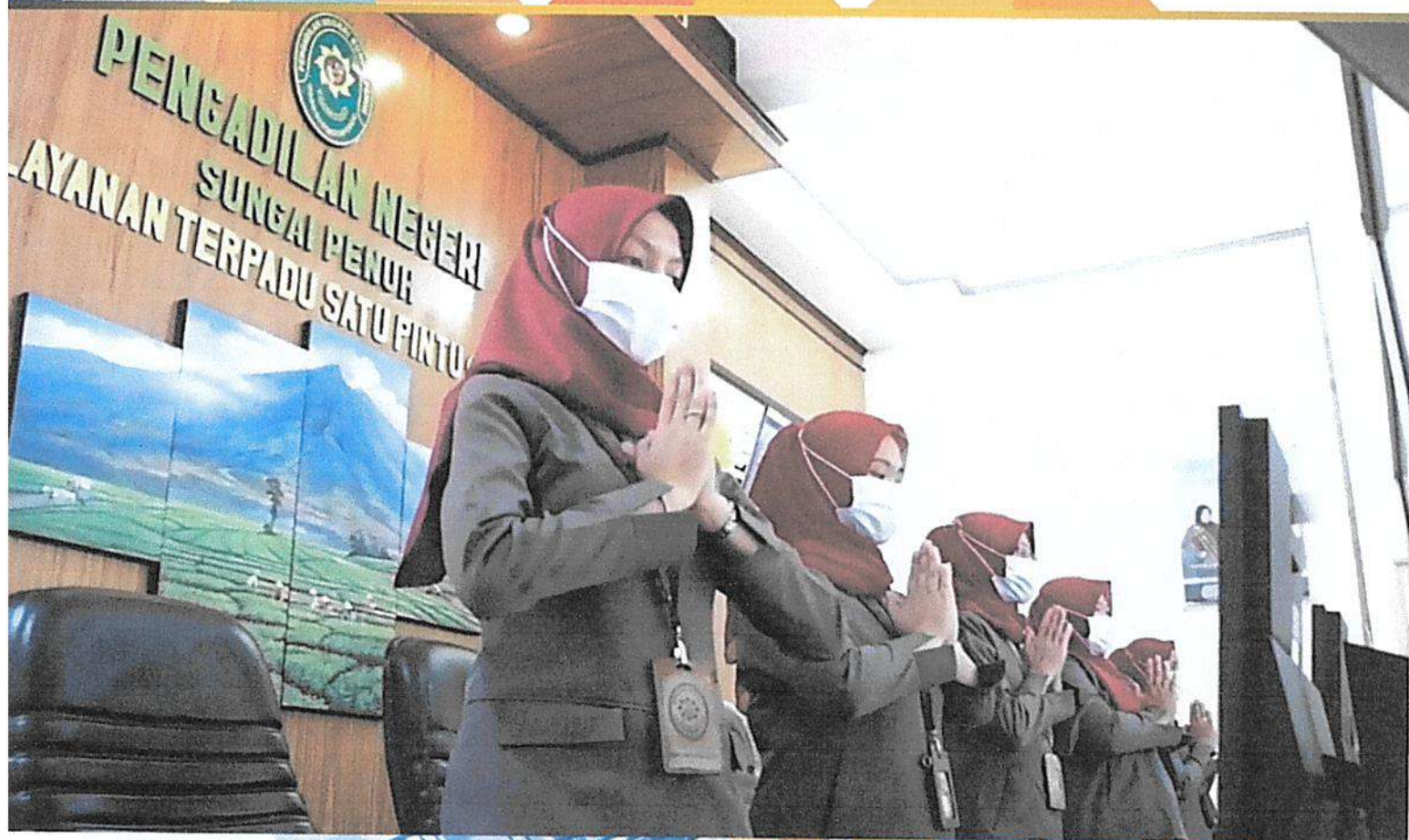


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II



Jl. Depati Parbo No. 24 Sungai Penuh Kode Pos 37114 TELP./Fax. 0748-21186



www.pn-sungaipenuh.go.id



info@pn-sungaipenuh.go.id



Pengadilan Negeri Sungai Penuh



PN Sungai Penuh



[pn.sungaipenuh](https://www.instagram.com/pn.sungaipenuh)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sebagai ucapan rasa syukur kita karena telah berakhirnya tahun 2021 dan bersamaan dengan telah selesainya pelaksanaan dari keseluruhan kegiatan tahun 2021 sesuai dengan program-program yang telah direncanakan. Semuanya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Sungai Penuh ini yang terdiri dari pelaksanaan Tahun Anggaran 2021. Pengadilan Negeri Sungai Penuh merasa bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 2021 Nomor : 3112 / SEK / OT.01.1 / 12 / 2021.

LKJIP (Laporan Kinerja Intansi Pemerintah) ini merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) sebelumnya.

Penyusunan LKjIP ini mengacu kepada Program Kerja Tahun 2021 lalu yang telah disusun dengan memperhatikan potensi dan peluang maupun kendala yang dihadapi. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan visi, misi sebagai sumber data dalam penyusunan LKjIP ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada. Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang belum sempurna seperti yang kita harapkan, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang akan datang.



Sungai Penuh, 14 Februari 2022

Ketua,

EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H., M.H.
NIP. 1979 11062002 1 21004

EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menetapkan 4 sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau Lebih) Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut diilustrasikan dalam tabel berikut :

1. SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
Persentase perkara :			
- Perdata	70%	58,44%	83,48%
- Pidana	87%	84,375%	96,98%
- Pidana Anak	89%	100%	112,35%
yang diselesaikan tepat waktu			

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
• Banding			
- Perdata	50%	77,77%	155,54%
- Pidana	87%	78,51%	90,24%
- Pidana Anak	90%	100%	111,11%
• Kasasi			
- Perdata	45%	62,22%	138,26%
- Pidana	80%	89,62%	112,025%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
• PK			
- Perdata	95%	88,88%	93,55%
- Pidana	95%	97,03%	102,136%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%	0	0
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	80,00%	106,25%

2. SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	3,44%	17,2%
Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat waktu	100%	95,94%	95,94%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	0%	0%

3. SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	0	0

4. SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%	11,11%	225,02%

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	5
BAB I. Pendahuluan	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas dan Fungsi	8
C. Struktur Organisasi	10
D. Isu Strategis	11
E. Sistematika Penyajian	13
BAB II. Perencanaan Kinerja	15
A. Rencana Strategis	15
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	23
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	28
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	30
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	33
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	40
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	41
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ..	41
B. Realisasi Anggaran	50
BAB IV. Penutup	52
A. Kesimpulan	52
B. Rekomendasi	53

Lampiran : 54

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh
2. SK Pembentukan Tim Penyusunan LKjIP 2021
3. Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2022)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pengadilan Negeri Sungai Penuh Berdiri sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang. Dalam perjalanan waktu Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berumur lebih kurang 55 tahun. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah Wilayah Kabupaten Kerinci Dengan 16 Kecamatan Dan Kota Sungai Penuh dengan 8 Kecamatan. Sedangkan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Terletak dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Berdasarkan Undang – Undang No 4 tahun 2004 sebagaimana telah di perbaiki kembali undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4

lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum.
6. **Fungsi Lainnya :**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
(vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.
(vide : Undang-Undang No. 28 tahun 1249 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/II/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/II/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/II/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penye-rapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial.
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana tergambar dalam **lampiran laporan ini**, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan :

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.

Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009.

2. Jabatan Fungsional :

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :

- a. Hakim.
- b. Panitera.
- c. Panitera Muda Pidana.
- d. Panitera Muda Perdata.
- e. Panitera Muda Hukum.
- f. Panitera Pengganti.
- g. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

3. Jabatan Struktural :

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari :

- a. Sekretaris.
- b. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- d. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

D. ISU STRATEGIS

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri merupakan program unggulan yang dicanangkan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Akreditasi memiliki tujuan menjadikan semua Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung memiliki standar yang tinggi terhadap pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Disamping pembenahan sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan, untuk menunjang akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan diperlukan juga pemberian layanan terbaik kepada pencari keadilan baik melalui survei index kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan maupun tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap aparat Pengadilan itu sendiri . Dengan adanya penjatuhan sanksi terhadap aparatur Pengadilan baik pada tenaga teknis maupun

tenaga sekretariat yang melakukan pelanggaran menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat terhadap aparatur pengadilan telah ditindaklanjuti dengan baik. Sejak bergulirnya program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan telah banyak pengadilan-pengadilan yang telah meraihnya sehingga hal memacu semangat Pengadilan lain untuk mengikutinya. Khusus pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh semua elemen baik pimpinan yang biasa disebut empat pilar yaitu : Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris beserta jajaran dibawahnya saling bekerja sama untuk memperoleh sertifikat akreditasi tersebut. Dengan langkah awal melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta perbaikan terhadap pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Setelah melewati berbagai tahapan untuk mendapatkan sertifikat Penjaminan Mutu Pengadilan maka pada tanggal 29 November 2017 di Makasar Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerima sertfikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan secara langsung dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan predikat "A Excellent".

Dengan mendapatkan sertifikat penjaminan mutu yang telah di raih oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan tanpa di duga pada pertengahan tahun 2019 kami tidak menyangka nilai Akreditasi kami turun menjadi (B), saat di lalukan telekomfrence antara Pengadilan Tinggi Jambi dengan Dirjen Badilum, dan setelah kami telusuri / kompirmasi ke Pengadilan Tinggi Jambi menurut inpormasi dari Pengadilan Tinggi Jambi yang mengatakan bahwa dokumen-dokumen yang di masukkan kedalam ceklis hyperlink Pengadilan Negeri Sungai Penuh masih banyak yang kurang dan setelah di lihat webshite Pengadilan Negeri Sungai Penuh masih banyak data-data yang tidak di masukkan / inpormasi tentang yang berkaitan dengan Laporan Bulanan, Laporan Realisasi Anggaran, RKAKL, kegiatan-kegiatan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh itu belum di masukkan petugas Pengadilan dan selanjutnya setelah di lihat SIKEP Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nilainya masih kurang di bawah 100%, maka oleh karena itu setelah kami pelajari dan telaah memang data-data kami masih ada kekurangan.

Pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Jambi mengadakan Keka dengan Dirjen Badilum dan akhirnya kami Pengadilan Negeri Sungai Penuh berhasil mendapatkan Kembali Nilai A Excelent pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 yang bertempat di

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, dan dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu Bapak Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H.,

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Tahun Anggaran 2021, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :

- a. Latar belakang.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi.
- c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- d. Isu Strategis
- e. Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- b. Rencana Kinerja Tahun 2021,2022,2023.
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Organisasi.
- b. Realisasi Anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang

- a. Kesimpulan.
- b. Rekomendasi.

LAMPIRAN

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti

1. Struktur Organisasi.
2. Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Rencana Strategis 2020-2024.
4. Rencana Kerja Tahun 2021,2022,2023.
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh, adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai mengambil dari Indikator Kinerja Utama yang telah dilakukan revidi oleh Mahkamah Agung. Indikator Kinerja Utama yang telah direvidi terdapat perubahan yaitu penyesuaian Indikator Kinerja Utama hanya berdasarkan core bisnis Pengadilan yang sesuai Tupoksi Pengadilan menerima, memeriksa dan memutus Perkara, dapat dilihat sebagai berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Anak b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana - Pidana anak yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan $\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak • Kasasi - Perdata - Pidana - Pidana Anak • PK - Perdata - Pidana - Pidana Anak	<u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> x 100% <u>Jumlah Putusan Perkara</u> Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi</u> x 100% <u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u> Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<u>Index Kepuasan Pencari Keadilan</u> Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	<u>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu</u> x 100% <u>Jumlah Putusan</u>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaza, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)		Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam melaksanakan Rancangan Strategis (Renstra) 2020 – 2024 menguraikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Namun demikian dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2021 masih ada yang belum berdasarkan Renstra Tahun 2020 – 2024, karena dokumen dimaksud dibuat dan ditetapkan sebelum penyusunan Renstra Tahun 2020 – 2024. Didalam Renstra 2020-2024 pun telah dilaksanakan reuiu dikarenakan terdapat perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	
	1. Perdata	100%
	2. Pidana	100%
	3. Pidana Anak	100%
	b. Persentase perkara :	
	1. Perdata	70%
	2. Pidana	87%
	3. Pidana Anak	89%
	Yang diselesaikan tepat waktu	
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
	1. Banding	
	- Perdata	50%
	- Pidana	87%
	- Pidana Anak	90%
	2. Kasasi	
	- Perdata	45%
	- Pidana	80%
	- Pidana Anak	100%
	3. PK	
	- Perdata	95%
	- Pidana	95%
	- Pidana Anak	100%
	d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%

Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Anak	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana - Pidana Anak Yang diselesaikan tepat waktu	70 % 90 % 100 %

		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding - Perdata 80 % - Pidana 80 % - Pidana Anak 90 % • Kasasi - Perdata 65 % - Pidana 89 % - Pidana Anak 100 % • PK - Perdata 90 % - Pidana 97 % - Pidana Anak 100 %	
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
Persentase perkara :			
- Perdata	70%	58,44%	83,48%
- Pidana	87%	84,375%	96,98%
- Pidana Anak	89%	100%	112,35%
yang diselesaikan tepat waktu			

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
• Banding			
- Perdata	50%	77,77%	155,54%
- Pidana	87%	78,51%	90,24%
- Pidana Anak	90%	100%	111,11%
• Kasasi			
- Perdata	45%	62,22%	138,26%
- Pidana	80%	89,62%	112,025%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
• PK			
- Perdata	95%	88,88%	93,55%
- Pidana	95%	97,03%	102,136%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%	0%	0%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	80,00%	106,25%

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. pada akhir tahun 2021 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)	Capaian	
				2020 (%)	2019 (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
1. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara :					
1. Perdata	70%	58,44%	83,48%	84,81%	65,75%
2. Pidana	87%	84,375%	96,98%	94,48%	104,48%
3. Pidana Anak	89%	100%	112,35%	88,89%	80%
Yang diselesaikan tepat waktu					
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
1. Banding					
- Perdata	50%	77,77%	155,54%	62,13%	374,616%
- Pidana	87%	78,51%	90,24%	92,48%	101,06%
- Pidana Anak	90%	100%	111,11%	114,94%	114,94%
2. Kasasi					
- Perdata	45%	62,22%	138,26%	180,6%	77,28%
- Pidana	80%	89,62%	112,025%	302,81%	89,28%
- Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%
3. PK					
- Perdata	95%	88,88%	93,55%	107,77%	111,11%
- Pidana	95%	97,03%	102,136%	114,04%	114,94%
- Pidana Anak	100%	100%	100%	0%	0%
Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%	0%	0%	0%	0%

Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	80,00%	106,25%	163,793%	131,035%
---	-----	--------	---------	----------	----------

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- **Perdata**

Perkara perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Permohonan yang masuk tahun 2020 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2021, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2020 dan baru disidangkan pada Tahun 2021, dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan serta ada yang masih dalam tahapan mediasi, persidangan dan pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2020 sebanyak 19 perkara dan pada Tahun 2021 diselesaikan sebanyak 19 Perkara sehingga capaiannya 100%.

Sisa Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2020 sebanyak 0 artinya perkara perdata gugatan sederhana telah dapat di selesaikan pada tahun 2020.

Sisa perkara Perdata Permohonan Tahun 2020 sebanyak 4 perkara perdata permohonan dan pada Tahun 2021 diselesaikan sebanyak 4 perkara sehingga capaian 100%.

Penyelesaian perkara Tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun		
	2019 Capaian %	2020 Capaian %	2021 Capaian %
Sisa Gugatan Perdata	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2020 sampai dengan capai tahun 2021 sebesar 100 %.

- Pidana

Perkara pidana yang masuk tahun 2020 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2021. Penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2020 dan baru disidangkan pada Tahun 2021, dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pledoi (pembelaan), dan pembacaan putusan.

Sisa perkara pidana Tahun 2020 sebanyak 11 perkara dan pada Tahun 2021 diselesaikan seluruhnya sebanyak 11 perkara, sehingga capaiannya 100% Penyelesaian perkara pidana Tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun		
	2019 Capaian %	2020 Capaian %	2021 Capaian %
Sisa Perkara Pidana	100 %	100 %	100 %

- **Pidana Anak**

Sisa Perkara Pidana Anak tahun 2020 sebanyak 1 Perkara sedangkan yang masuk pada tahun 2021 sebanyak 10 perkara, Target ditetapkan 100% sedangkan realisasinya 9.0% dan nilai capaian kinerjanya 9.0%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh cukup baik Karena perkara Pidana anak masuk pada bulan desember tahun 2020.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana Anak yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun		
	2019 Capaian %	2020 Capaian %	2021 Capaian %
Sisa Perkara Pidana Anak	100 %	100%	9.0%

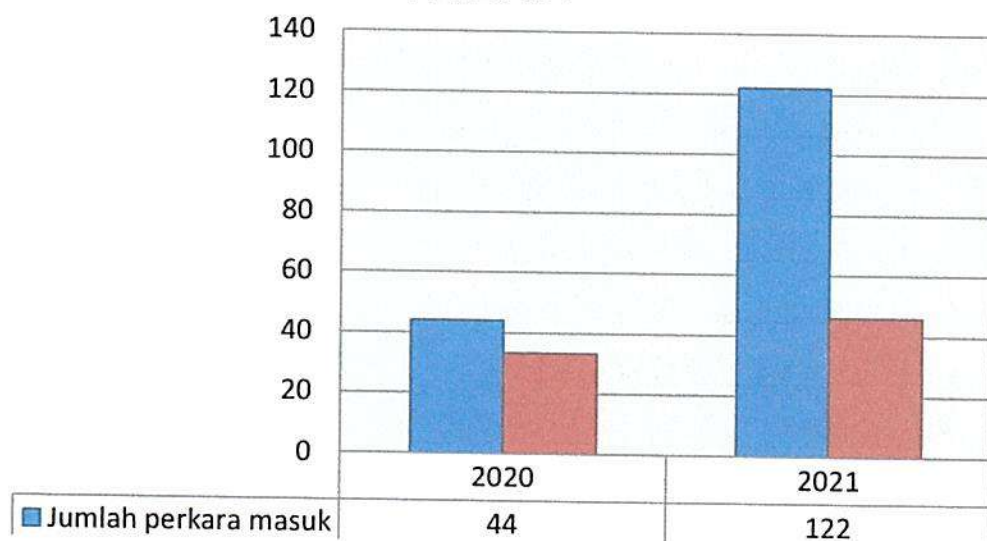
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2021 dengan perkara jumlah perkara yang ada pada tahun 2021 baik itu sisa awal tahun 2021 maupun perkara yang masuk pada 2021.

- **Perdata**

Pada Perkara Perdata Gugatan, sisa awal tahun 2021 adalah sebanyak 19 perkara, Perdata Gugatan Sederhana sisa awal tahun 2021 adalah sebanyak 0 Perkara, dan Perkara Permohonan sisa awal tahun 2021 adalah sebanyak 4 perkara, sedangkan perkara Perdata yang masuk pada tahun 2021 adalah sebanyak 58 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

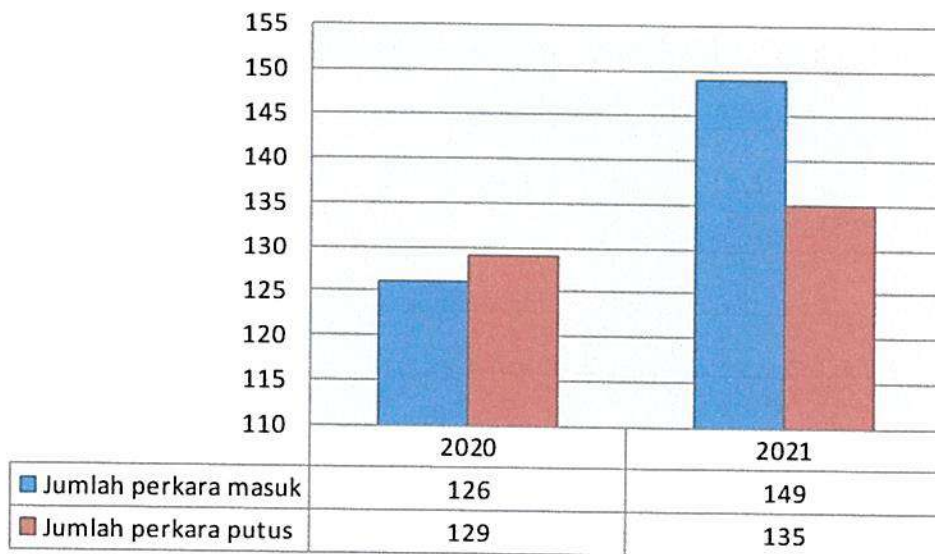


Perkara Perdata Gugatan masuk di tahun 2021 adalah sebanyak 58 perkara, Perdata Gugatan Sederhana Masuk Pada tahun 2021 adalah sebanyak 2 Perkara dan Perkara Permohonan Masuk pada tahun 2021 adalah sebanyak 62 perkara, Pengadilan Negeri Sungai Penuh sampai akhir desember 2021 berhasil memutus sebanyak 45 perkara ini berarti terealisasi sebesar 58,44% belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 70% serta memiliki nilai capaian kinerja sebesar 83,84%. Hal ini disebabkan karena banyak perkara perdata yang masuk pada akhir tahun sehingga perkara perdata masih berjalan pada upaya pemeriksaan perkara.

- **Pidana**

Sisa awal perkara pidana biasa tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebanyak 11 perkara, sisa awal perkara pidana cepat tahun 2020 adalah sebanyak 0 perkara dan perkara masuk pidana biasa ditahun 2021 sebanyak 149 perkara, Dari jumlah perkara pidana tersebut sebanyak 160 perkara. Dari keseluruhan perkara yang dapat diputus pada tahun 2021 adalah sebanyak 135 perkara atau sebesar 84,375% belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 87% yang berarti memiliki pencapaian kinerja sebesar 96,98%.

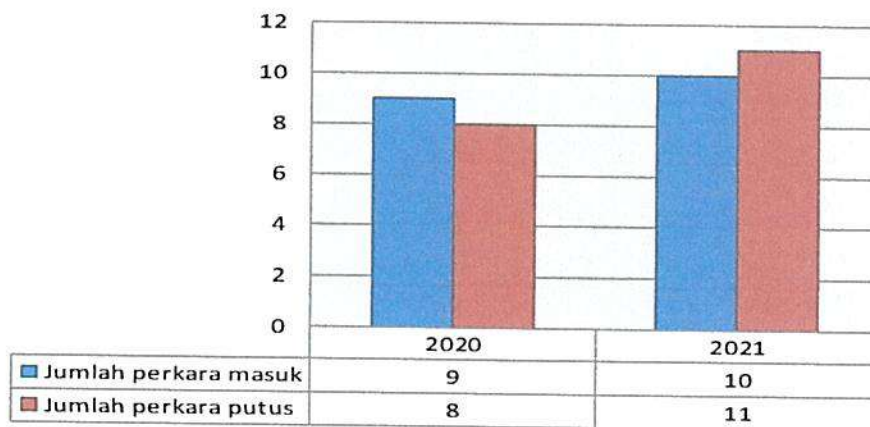
PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA



- **Pidana Anak**

Perkara pidana anak yang masuk pada tahun 2021 terdapat 10 perkara sedangkan sisa awal tahun 2020 adalah 1 Perkara. Dari 11 perkara tersebut semuanya dapat diputus atau diselesaikan semua pada tahun 2021, itu juga atau dengan kata lain terealisasi sebesar 100% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 89% dengan nilai capaian kinerja sebesar 112,35%.

PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK



c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

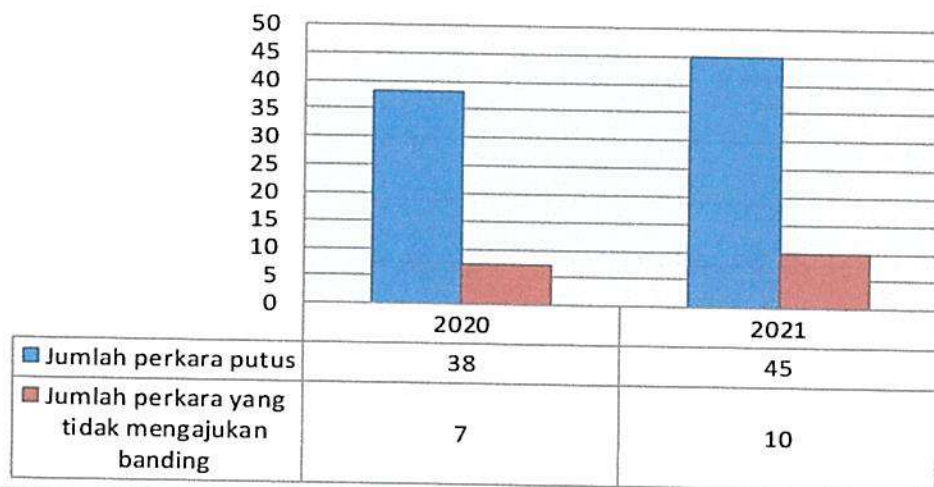
Pada penyelesaian perkara pada Pengadilan baik perkara perdata gugatan, perdata gugatan sederhana, perdata permohonan, pidana biasa, pidana cepat maupun pidana anak seringkali ada pihak tidak puas terhadap putusan dari Hakim yang menangani perkara tersebut. Untuk itu pihak yang tidak puas terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dirincikan sebagai berikut :

- **Banding**

- **Perdata**

Dari 45 perkara Perdata Gugatan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2021 sebagian atau sebanyak 10 perkara mengajukan upaya hukum Banding sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebanyak 35 perkara. Berarti sekitar 77,77% dari perkara perdata yang putus tidak mengajukan upaya hukum. Dengan target yang ditetapkan sebesar 50% dari perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat terlihat bahwa realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja sebesar 15,54%.

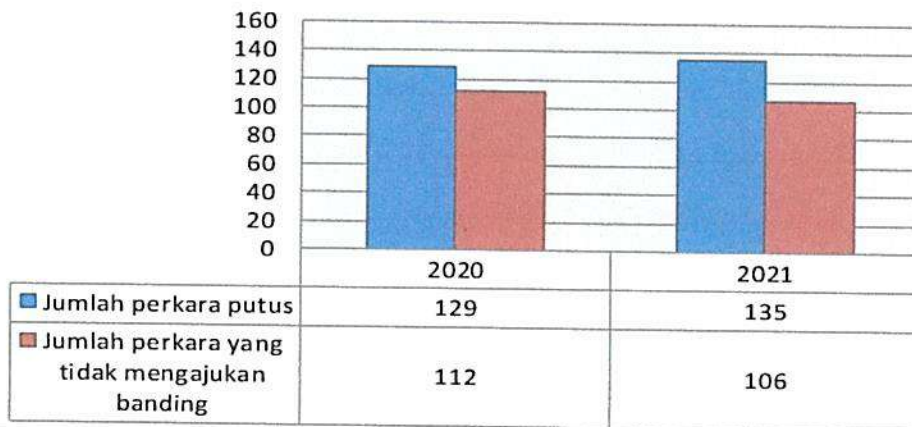
PERBANDINGAN PERKARA PERDATA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING



➤ Pidana

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus 135 perkara pidana biasa. Dari 135 perkara tersebut terdapat 29 perkara yang mengajukan upaya hukum banding, sehingga pihak yang menerima atau tidak mengajukan upaya hukum banding berjumlah 106 perkara. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada putusan Pengadilan cukup tinggi yaitu sebesar 78,51% belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 87% dengan nilai capaian kinerja sebesar 90,24%.

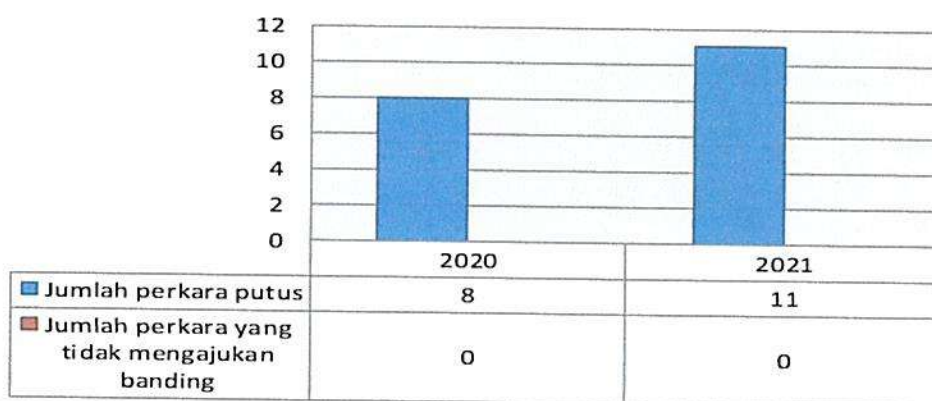
PERBANDINGAN PERKARA PIDANA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING



➤ Pidana Anak

Perkara pidana anak yang diselesaikan atau diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2021 sebanyak 11 perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum Banding sehingga 11 perkara tersebut tidak mengajukan upaya hukum atau menerima putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dari 11 perkara yang putus 100% tidak mengajukan upaya hukum banding lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 87% dengan nilai capaian kinerja sebesar 114,94%.

PERBANDINGAN PERKARA PIDANA ANAK YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

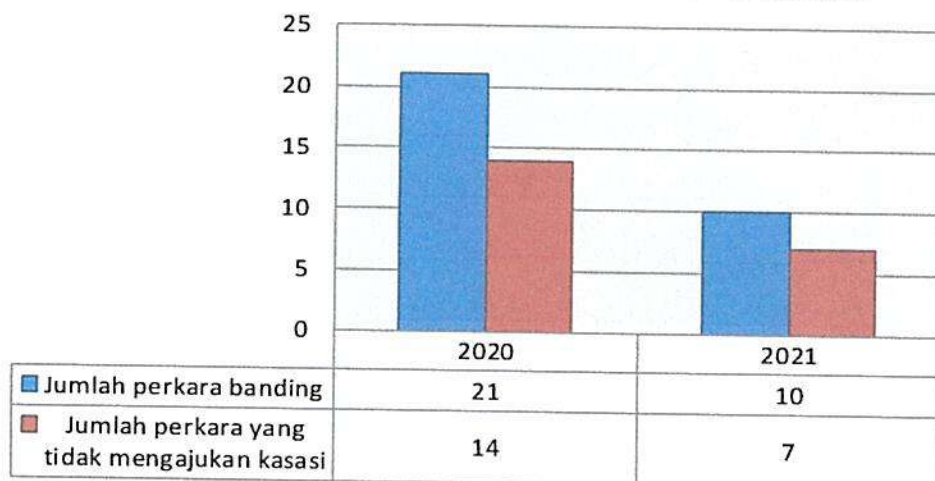


- Kasasi

- Perdata

Dari 10 perkara perdata yang telah mengajukan upaya hukum Banding sebagian besar atau sebanyak 17 perkara lanjut mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga hanya 7 perkara atau 58,82% perkara saja yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 45% atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 130,71%. Karena dalam perkara perdata pihak yang tidak puas akan melakukan upaya hukum Banding dan pada saat putusan dari pengadilan tingkat banding telah turun maka pihak tersebut akan melanjutkan upaya hukum Kasasi, dengan alasan mereka memperjuangkan hak mereka atas tanah atau objek sengketa tersebut. Dengan capaian kinerja yang belum mencapai target tersebut maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh akan berusaha meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

PERBANDINGAN PERKARA PERDATA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI



➤ Pidana

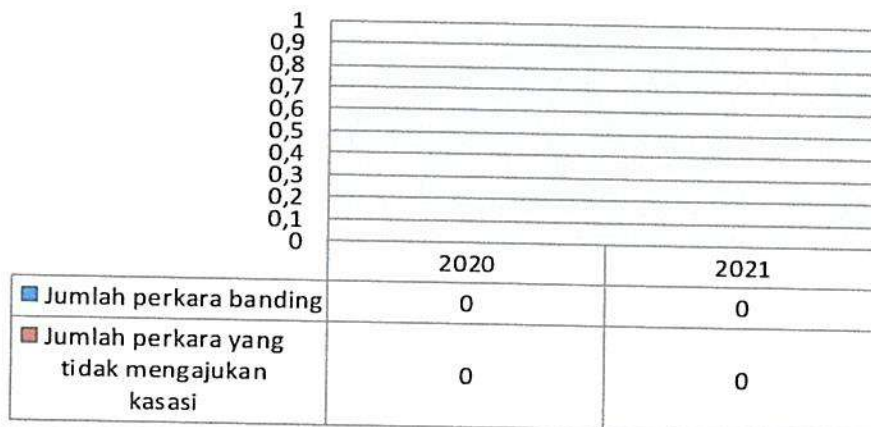
Pada tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diajukan upaya hukum Banding sebanyak 29 perkara sedangkan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 14 perkara, sehingga 15 perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi atau sebesar 51,72%. Sehingga realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ini telah belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 87% dengan nilai capaian kinerja sebesar 59,44%. Ketidak puasan terhadap putusan pengadilan tingkat banding merupakan faktor utama pengajuan upaya hukum Kasasi ini.



➤ Pidana Anak

Jumlah perkara pidana anak yang diajukan upaya hukum banding pada tahun 2021 adalah sebanyak 0 perkara. Dengan demikian semua pihak telah menerima putusan dari pengadilan tingkat banding tersebut. Pencapaian realisasi pihak yang menerima putusan mencapai 100% sehingga sudah terpenuhi dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

PERBANDINGAN PERKARA PIDANA ANAK YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

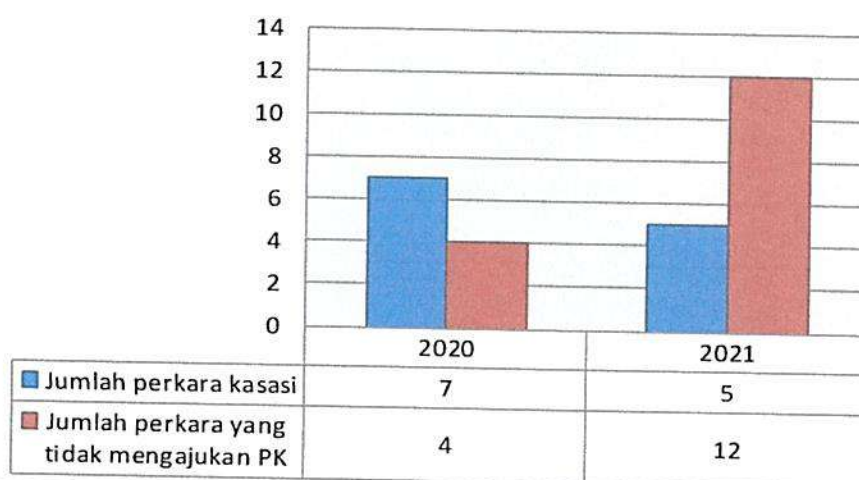


- Peninjauan Kembali (PK)

- Perdata

Dari 17 perkara perdata yang diajukan upaya hukum kasasi ada 5 perkara yang dilanjutkan melaksanakan upaya hukum luar biasa dikarenakan perkara perdata tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). berarti 12 perkara perdata yang lain menerima putusan pengadilan tingkat kasasi atau terealisasi sebesar 88,88% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 95% dengan nilai capaian kinerja sebesar 93,55%.

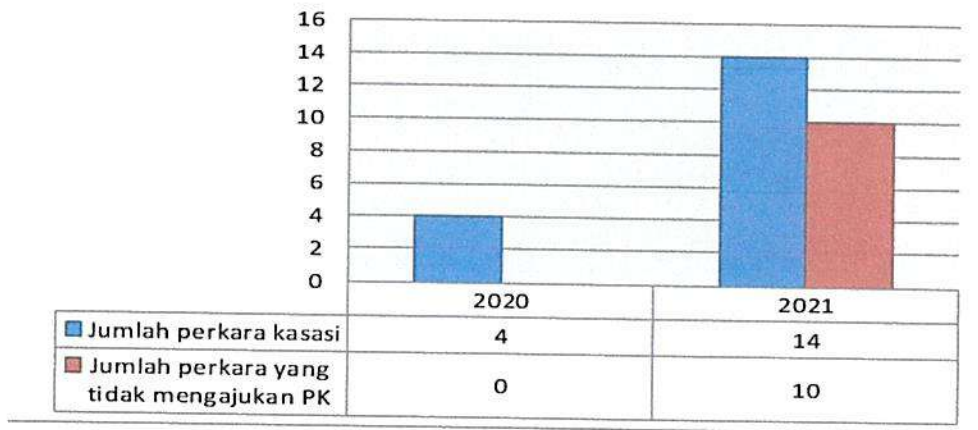
PERBANDINGAN PERKARA PERDATA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA PK



➤ Pidana

Di tahun 2021 jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 14 perkara. Dari 14 perkara tersebut terdapat 4 perkara yang melanjutkan mengambil upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), dengan kata lain sebanyak 71,42% atau sebanyak 10 perkara yang telah menerima putusan pengadilan tingkat kasasi dengan baik. Pencapaian ini telah belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95% dengan nilai capaian kinerja sebesar 75,17%.

PERBANDINGAN PERKARA PIDANA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA PK



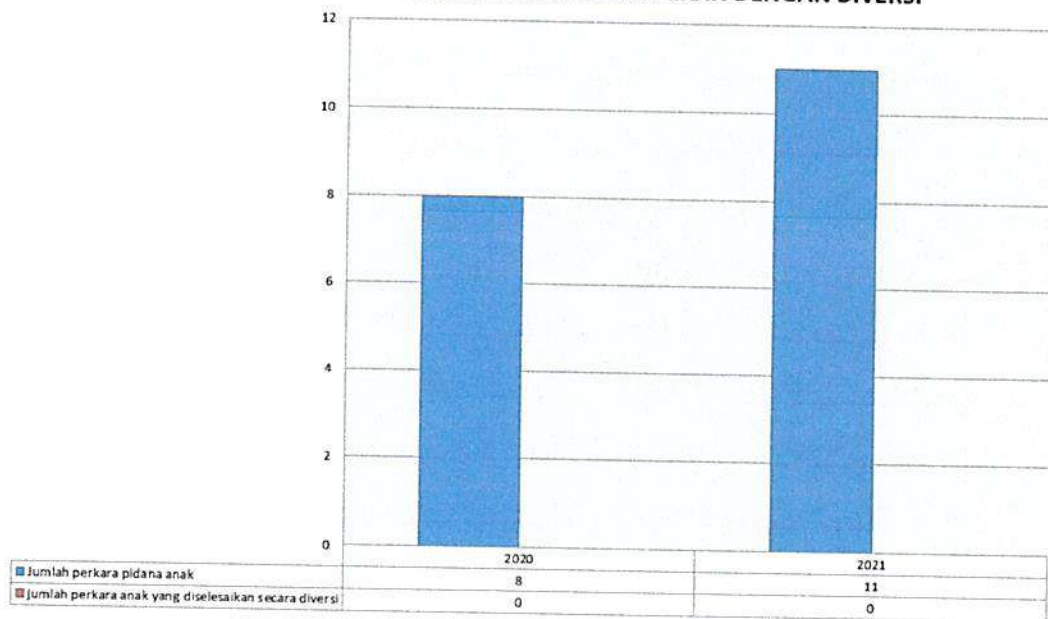
➤ Pidana Anak

Karena pada tahun 2021 tidak ada perkara pidana anak yang mengajukan upaya hukum kasasi maka pada target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan atau Peninjauan Kembali (PK) tidak mencapai target yang ditentukan sebesar 100%.

d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi :

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di targetkan sebesar 2%. Jumlah perkara pidana anak yang masuk tahun 2021 sebanyak 11 perkara, dari perkara pidana anak yang masuk, tidak ada perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, sehingga realisasi tahun 2021 adalah sebesar 0%. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 0% karena tidak mampu melewati target yang direncanakan sebesar 2%. Hal ini disebabkan tidak adanya perkara anak yang di selesaikan melalui diversi.

PERBANDINGAN PERKARA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI



e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di targetkan sebesar 85%. Pengadilan Negeri Sungai Penuh melakukan survei IKM setiap 6 bulan sekali, survei IKM yang dilakukan pada bulan Oktober s/d November 2021, memperoleh nilai indeks sebesar 98,83%, dengan kategori penilaian baik survei IKM selanjutnya dilakukan pada bulan Desember 2021, memperoleh nilai indeks 98,83 % dengan kategori penilaian sangat baik. Seperti pada tabel berikut :

Hasil Survei IKM Periode Desember 2021

Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No.	Unsur pelayanan	Nilai unsur pelayanan	Nilai Indeks Per Unsur
1.	Bagaimana pendapat saudara tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan perkara baik teknis maupun administratif?	3,96	7
2.	Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di instansi ini ?	3,92	9
3.	Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan waktu pelayanan di instansi ini?	3,96	2

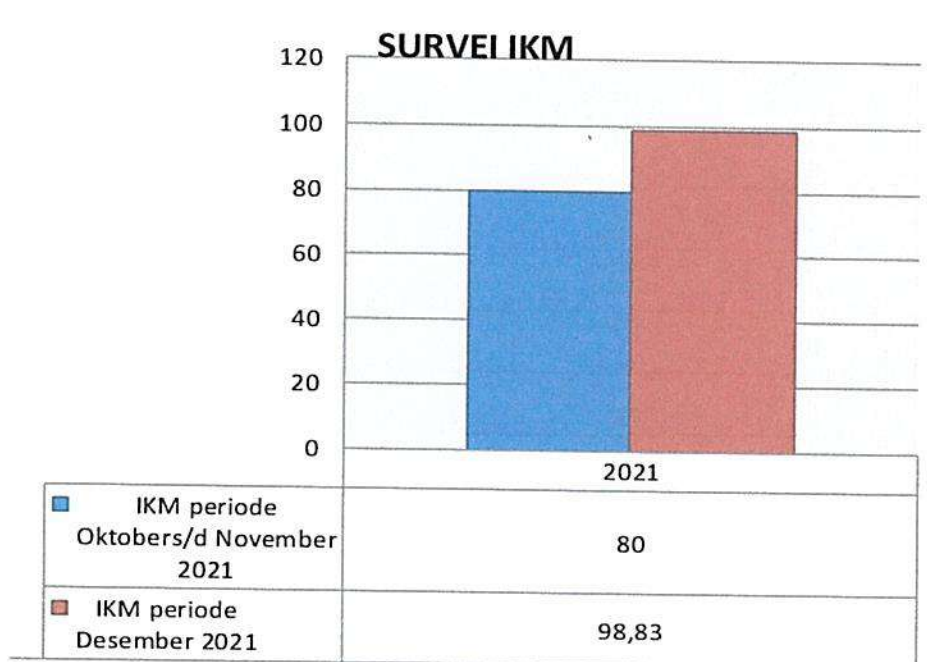
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan ?	3,92	8
5.	Bagaimana pendapat saudara tentang hasil pelayanan yang diberikan dan diterima apakah sesuai dengan aturan ?	3,96	3
6.	Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan di instansi ini ?	3,96	4
7.	Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?	3,96	5
8.	Mengenai sarana dan prasarana, bagaimana menurut bapak/Ibu/sadr, tentang kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja perangkat di PN. Sungai Penuh dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.?	3,96	6
9.	Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan, saran dan masukan di instansi ini ?	3,98	1
TOTAL			45 %

Nilai Indeks = Nilai indeks per unsur x 25 = 98,83 %
 Mutu pelayanan = B
 Kinerja Unit Pelayanan = Baik

NO	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	D	TIDAK BAIK
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	C	KURANG BAIK
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	B	BAIK
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100	A	SANGAT BAIK

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 87,0% + 88,07% dibagi 2 adalah 131,035% sudah mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 80 %, hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dapat memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap para pencari keadilan.

Grafik



Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)	Capaian	
				2020 (%)	2019 (%)
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	3,44%	17,2%	0%	61,5%
Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	95,94%	95,94%	100%	100%

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	0%	0%	100%	100%
--	------	----	----	------	------

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

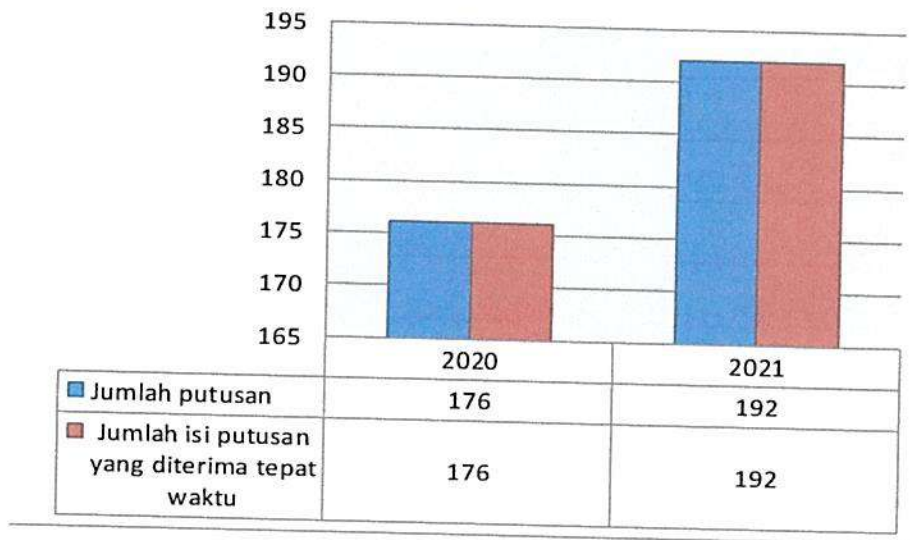
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu di targetkan sebesar 100%. Keseluruhan jumlah perkara yang diputus pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Sungai Penuh baik perdata, Gugatan Sederhana, pidana dan pidana anak adalah sebanyak 192 perkara, dari jumlah perkara yang diputus, sebanyak 192 isi putusan perkara diterima oleh para pihak tepat waktu, sehingga persentase capaian tahun 2021 adalah sebesar 100%.

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%, karena telah sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100%, capaian ini didukung oleh ketersediaan SDM (jumlah jurusita pengganti) yang cukup memadai, sama dengan capaian target kinerja tahun lalu yaitu sebesar 100%.

Sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2020	Tahun 2021	
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	0%

PERBANDINGAN JUMLAH ISI PUTUSAN YANG DITERIMA TEPAT WAKTU



b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

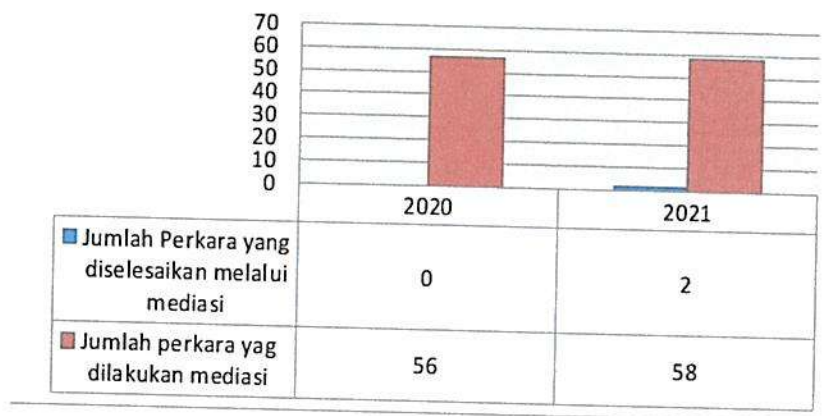
Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerima gugatan perkara perdata sebanyak 77 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2020 sebanyak 19 perkara dan perkara yang masuk pada tahun 2021 sebanyak 58 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut sebanyak 58 perkara wajib dilaksanakan upaya perdamaian atau mediasi terdapat 2 perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2021 sebesar 3,44%, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 20%. Dengan nilai capaian 17,2% Hal ini terjadi Dikarenakan, para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menempuh perdamaian meskipun telah di bantu oleh Mediator di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dapat digambarkan melalui tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0 %	17,2%	17,2%

PERBANDINGAN PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI



c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK ditargetkan sebesar 100%. Dari 74 perkara yang melakukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK), seluruh berkas perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut terdapat 71 perkara telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga persentase capaian tahun 2021 adalah sebesar 95,94%.

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 95,94%, sesuai dengan target yang ditetapkan,

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK digambarkan sebagaimana tabel dan sebagaimana grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK	100 %	95,94 %	4,06%



- d. **Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.**

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah 100 %. Hal ini sesuai dengan yang ditargetkan. Karena semua perkara yang sudah diputus sudah langsung diupload di SIPP Pengadilan Negeri Sungai Penuh, baik di local server, maupun di website Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus digambarkan sebagaimana tabel dan sebagaimana grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	0%



Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)	Capaian	
				2020 (%)	2019 (%)
Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%	100%	100%

a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pada tahun 2021, setiap hari dan jam kerja sudah disediakan Advokat piket yang siap membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dari data yang diterima, ada pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Pada tahun tersebut tidak ada orang pencari keadilan dari golongan tertentu telah meminta pelayanan pada Posbakum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan semua atau sebanyak 0% tidak mendapatkan Layanan Posbakum atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 0%.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%



Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)	Capaian	
				2020 (%)	2019 (%)
Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%	11,11%	225,02%	0%	100%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Pada tahun 2021, jumlah perkara perdata yang telah putus sebanyak 45 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum (berkekuatan hukum tetap) sebanyak 0 perkara. Perkara Kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah kembali di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 17 perkara. Sehingga jumlah keseluruhan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebanyak 36 perkara. Dari 36 perkara yang berkekuatan hukum tetap hanya ada 4 perkara yang mengajukan eksekusi. Dari 4 Permohonan perkara yang mengajukan eksekusi tersebut hanya ada 4 perkara yang telaksana, itu semua di karenakan keamanan dari kepolisian tidak menyanggupi dikarenakan Pandemi Covid-19 ini.

Sehingga realisasi permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti pada tahun 2021 sebesar 11,11% atau dengan kata lain tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 25% dengan nilai capaian kinerja 225,02%.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2021, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	BELANJA PEGAWAI	2.714.818.000	2.492.668.511	91,81%
2.	BELANJA BARANG			
	BA. 01-098921	1.052.039.000	1.048.420.464	99,66%
	BA. 03-099224	83.178.000	81.341.000	97,80%
3.	BELANJA MODAL	287.500.000	286.200.000	99,55%

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2021 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara keseluruhan DIPA 01 mencapai Rp. 3,827,288,975,- atau 94,40% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2021 sebesar Rp. 2.714.818.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.492.668.511,- dengan jumlah pegawai 29 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 91,81% Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2021 sebesar Rp. 1.052.039.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 1.048.420.464,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,66% Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Barang DIPA-03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2021 sebesar Rp. 83,178,000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 81,341,000,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 97,80% Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

4. Belanja Modal

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA 2021 sebesar Rp. 287,500,000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 286,200,000,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,55% Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2021 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2021 dan DIPA-03 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2021 pada satker Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah mencapai Rp. 3,827,288,975,- atau 94,40% Sementara untuk Belanja Barang DIPA-03 Dirjen Badilum, mencapai 81,341,000,- atau 97,80% sehingga mengalami kenaikan penyerapan dibandingkan dengan tahun 2020 yang disebabkan karena disesuaikannya jumlah rencana anggaran dengan kebutuhan anggaran untuk operasional perkantoran yang mengakibatkan penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil rewiu Indikator Kinerja Utama Anggaran yang digunakan untuk menunjang Kinerja Utama adalah merupakan DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) sedang DIPA Badan Urusan Administrasi (01) merupakan penunjang agar tercapainya tujuan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kekurang sempurnaannya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejumlah 21 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- c. Jumlah Hakim yang terbatas yang hanya mempunyai 7 (tujuh) orang Hakim termasuk Ketua dan tidak ada Wakil Ketua menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dalam hal penyelesaian perkara yang cukup banyak yang perlu ditangani di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- d. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dan kopabel dirasakan masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelatihan maupun penataran ataupun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

B. REKOMENDASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personil terutama Hakim dan tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
5. Perlu adanya sosialisasi tentang Aplikasi-Aplikasi yang baru termasuk diantaranya sosialisasi pembuatan SKP dan PKP pada tahun 2022.



Sungai Penuh, Februari 2022
Ketua

EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H.
NIP. 1979 11062002 1 21004

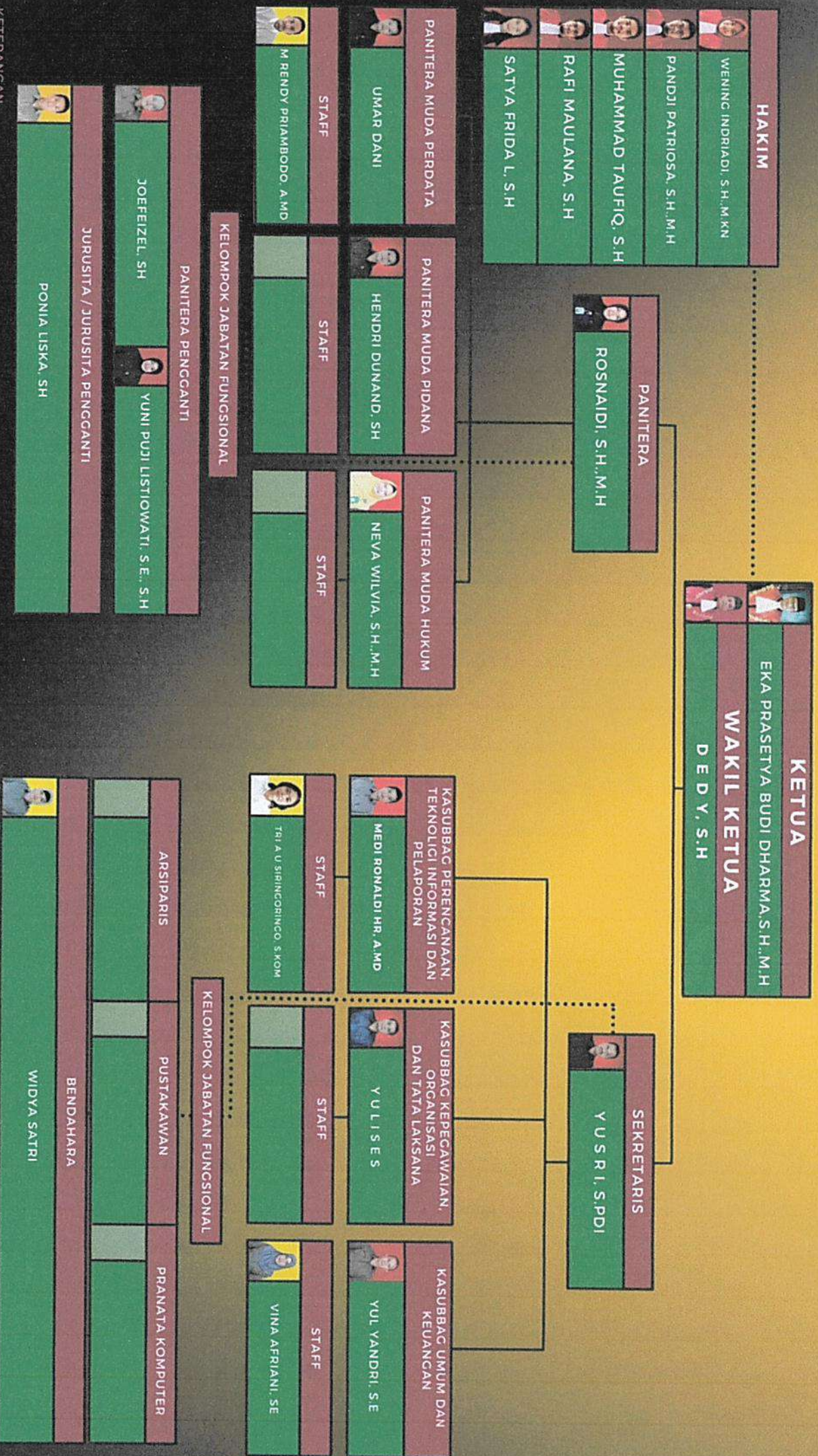
LAMPIRAN LAMPIRAN

1. *Struktur Organisasi*
2. *Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*
3. *Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022*



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015





SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NOMOR : W5-U4/ 51 /OT.01.2/1/2022

TENTANG :

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTIM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2019 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Sistim Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) ;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 ;
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor. 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen (SAKIP) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor. W5-U4/171/OT.01.2/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Tim Penyusunan Laporan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Klas II.

Kedua.....

Kedua : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2020- 2024 sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut :

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
2. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ;
3. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan Dokumen 2023 ;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 ;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 ;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ke-empat : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
PADA TANGGAL : 3 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH

EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH.MH.
NIP. 19791106 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Badan urusan Administrasi MA-RI di Jakarta
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NOMOR : W5-U4/ 51 /OT.01.2/1/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

Tim Penyusunan Laporan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP)

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH 2020- 2024

NO	NAMA NIP PANGKAT /GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH.MH Nip.19791106 200212 1 004	Ketua	Pelindung / Penasehat
2	DEDY.SH Nip.19731202 200003 1 001	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	ROSNAIDI,SH.MH Nip.19680901 199603 1 001	Panitera	Kodinotor Adm Teknis
4	YUSRI,S.Pdi Nip.19671212 98903 1 007	Sekretaris	Sekretaris
5	UMAR DANI Nip.19650626 198903 1 005	Panmud Perdata	Anggota
7	HENDRI DUNAND.SH Nip. 19711108 199403 1 001	Panmud Pidana	Anggota
8	NEVA WILVIA.SH.MH Nip. 19890315 201101 2 012	Panmud Hukum	Anggota
9	YULISES Nip. 19650707 199203 1 004	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan tata laksana	Anggota
10	YUL YANDRI.SE Nip. 19841018 200604 2 001	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
11	MEDI RONALDI HR.A.Md Nip. 19810308 201101 1 002	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH



EKA PRASETYA BUDI DHARMA.SH.MH
NIP. 197911062002121004